

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

(Studi pada Program UMKM Go-Digital)

Rusdiani*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli, Indonesia

*Penulis korespondensi: rusdiani300393@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the role of local government policies in supporting sustainable economic growth through the UMKM Go-Digital program. The research highlights how digital transformation has become an essential strategy for strengthening micro, small, and medium enterprises (MSMEs) amidst rapid technological development and increasingly competitive market dynamics. Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation to analyze policy implementation and its impacts. The findings show that local governments facilitate digital literacy training, strengthen digital infrastructure, and build collaborative partnerships with marketplaces, financial institutions, and technology providers. These initiatives have improved MSMEs' digital capabilities, expanded market reach, and increased business competitiveness. Despite these achievements, several challenges remain, including uneven digital literacy, limited internet access, and insufficiently skilled mentors. The study concludes that UMKM Go-Digital is an effective policy instrument but requires continuous improvement in infrastructure and human resource capacity to achieve sustainable and inclusive economic development. The implications emphasize the need for integrated policymaking, cross-sector collaboration, and long-term digital empowerment strategies.*

Keywords: *Digital Economy; Local Government Policy; MSMEs; Sustainable Development; UMKM Go-Digital*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui program UMKM Go-Digital. Transformasi digital dipahami sebagai strategi penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memahami implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap penguatan kapasitas digital UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan pelatihan literasi digital, memperkuat infrastruktur digital, serta membangun kemitraan dengan marketplace, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. Inisiatif tersebut terbukti meningkatkan kemampuan digital pelaku UMKM, memperluas jangkauan pemasaran, serta mendorong efisiensi operasional. Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta kurangnya pendamping yang memiliki kompetensi digital memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program UMKM Go-Digital merupakan instrumen kebijakan yang efektif, tetapi memerlukan peningkatan keberlanjutan, penguatan kapasitas pendamping, serta pemerataan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Implikasi penelitian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan perencanaan kebijakan jangka panjang dalam memperkuat digitalisasi UMKM.

Kata kunci: Digitalisasi; Kebijakan Pemerintah Daerah; Pembangunan Berkelanjutan; UMKM Go-Digital; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam menghadapi dinamika global, terutama pada era ekonomi digital yang terus berkembang secara cepat. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur perekonomian, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurut (Ndraha et al., 2024), ekonomi digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM, memperluas pasar, serta menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih inklusif. Namun, proses

digitalisasi ini tidak selalu berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi, hingga akses terhadap pembiayaan.

Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah kajian menegaskan bahwa dukungan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memegang peran strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang mendorong UMKM mampu beradaptasi di era Industri 4.0 (Hapiz et al., 2025). Pemerintah daerah menjadi aktor kunci karena memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan lokal, menyediakan sarana pendukung, serta memfasilitasi pelatihan dan pendampingan digital bagi UMKM. (Nurhayati & Ridwan, 2025) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang terarah dan responsif terhadap perubahan teknologi merupakan faktor penting untuk memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional.

Pada saat yang sama, berbagai penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendorong yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. (Maimuna et al., 2024) menyoroti bahwa rendahnya kemampuan adaptasi teknologi, keterbatasan SDM, dan minimnya inovasi kebijakan menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi digital. Sementara itu, studi lain menyebutkan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat (Handini et al., 2025; Morisson & Fikri, 2025; Swann et al., 2023). Hal ini bertujuan agar digitalisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam program UMKM Go-Digital, berbagai penelitian terdahulu menggambarkan bahwa digitalisasi dapat diimplementasikan melalui pengembangan sistem pemasaran berbasis web, peningkatan literasi digital, pemanfaatan media sosial, serta integrasi platform digital seperti Google Maps untuk memperluas akses pasar (Made Saraa et al., 2020; Muzdalifah et al., 2020; Sucipto et al., 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan UMKM Go-Digital di tingkat daerah masih menunjukkan variasi, baik dari sisi program, efektivitas, maupun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, dorongan menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. (Malihah et al., 2022) menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan strategi adaptif serta kebijakan yang mampu merespons perubahan, termasuk perubahan iklim dan dinamika sosial ekonomi. Di berbagai daerah, kebijakan pemerintah juga berperan penting

dalam mendorong ekonomi inklusif, kemitraan bisnis berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suhardi & Panjaitan, 2025; Zulaika et al., 2024).

Berdasarkan berbagai fenomena dan temuan kajian tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah daerah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui program UMKM Go-Digital. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan digitalisasi, memperkuat daya saing UMKM, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory: Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory)

Teori Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar konseptual utama dalam penelitian ini karena menekankan pembangunan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (governance). Teori ini pertama kali diperkenalkan melalui Brundtland Report yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Marlinah, 2019).

Dalam pemerintahan daerah, teori ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Transformasi digital UMKM merupakan salah satu strategi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Alam et al., 2023).

Konsep UMKM Go-Digital

Program UMKM *Go-Digital* merupakan inisiatif untuk mendorong pelaku UMKM agar memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, produksi, distribusi, hingga manajemen keuangan. Penelitian (Ma'aruf & Putra, 2019) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat diimplementasikan melalui pengembangan website penjualan, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi media sosial.

(Lyman & Subroto, 2017) menambahkan bahwa digitalisasi UMKM juga menjadi inovasi adaptif dalam menghadapi disrupsi seperti pandemi COVID-19. Sementara itu, peningkatan literasi digital melalui pelatihan intensif menjadi salah satu faktor utama kesuksesan program ini (Sucipto et al., 2025). Dari perspektif teori, UMKM Go-Digital

menjadi praktik konkrit penerapan ekonomi digital sekaligus strategi pembangunan ekonomi daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan. (Handini et al., 2025) menyatakan bahwa inovasi kebijakan pembangunan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mendorong daya saing daerah.

Dalam isu keberlanjutan, Malihah (2022) menegaskan bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan yang adaptif terhadap perubahan iklim, teknologi, serta tantangan sosial ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Zulaika et al. (2024) dan Suhardi & Panjaitan (2025) yang menyoroti pentingnya sinergi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi inklusif dan pertumbuhan jangka panjang.

Pada konteks UMKM Go-Digital, pemerintah daerah berperan dalam menyediakan infrastruktur digital, memfasilitasi pelatihan, memberikan insentif usaha, membangun kemitraan, serta menciptakan regulasi yang mendukung transformasi digital sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui program UMKM Go-Digital. Populasi penelitian mencakup pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pendamping program, dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan kunci berdasarkan keterlibatan dan relevansi mereka dalam implementasi program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sementara validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang menunjukkan data konsisten dan kredibel.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model penelitian menggambarkan hubungan antara kebijakan pemerintah daerah sebagai input, implementasi program UMKM Go-Digital sebagai proses, dan peningkatan literasi digital, daya saing UMKM, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai output. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi efektivitas kebijakan daerah dalam memperkuat digitalisasi UMKM secara komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun berbagai kebijakan strategis untuk mendukung proses digitalisasi UMKM. Wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi dan UMKM mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dirancang sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen. Pemerintah daerah menyadari bahwa digitalisasi bukan hanya sebuah tren, tetapi sudah menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pelatihan literasi digital yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Program-program ini meliputi pelatihan penggunaan perangkat digital dasar, pembuatan akun di platform e-commerce, serta dasar-dasar pemasaran digital melalui media sosial. Dalam beberapa kegiatan, pelaku UMKM dibimbing secara langsung untuk membuat konten pemasaran yang menarik dan relevan dengan pasar sasaran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan berbasis praktik lapangan.

Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan operasional. Kolaborasi kedua dinas tersebut tampak pada sejumlah workshop yang digelar secara terpadu, seperti workshop e-commerce, pembuatan katalog digital, serta pelatihan penggunaan aplikasi keuangan sederhana. Pemerintah daerah juga menghadirkan praktisi digital dan pelaku usaha sukses sebagai narasumber untuk memberikan inspirasi dan pengetahuan praktis kepada peserta.

Selain pelatihan, pemerintah daerah juga mengembangkan kebijakan yang mendukung infrastruktur digital. Salah satu kebijakan yang ditemukan adalah penguatan jaringan internet publik di pusat-pusat UMKM seperti sentra kerajinan, pasar tradisional, dan kawasan ekonomi. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki akses yang memadai untuk memanfaatkan teknologi digital. Meskipun belum merata di seluruh wilayah, langkah ini dipandang sebagai upaya awal yang penting dalam membangun ekosistem digital tingkat lokal.

Pemerintah daerah juga menjalin kemitraan dengan berbagai platform marketplace nasional dan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan lebih signifikan kepada UMKM. Kemitraan tersebut mencakup program onboarding UMKM ke marketplace, pelatihan

penggunaan dashboard toko online, hingga akses pembiayaan digital melalui fitur digital lending. Temuan dokumentasi menunjukkan bahwa kerja sama ini juga dituangkan dalam nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam memperluas peluang digital bagi UMKM.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka telah merasakan peningkatan kapasitas digital setelah mengikuti program UMKM Go-Digital. Mereka mengaku lebih percaya diri dalam menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran, memahami analitik sederhana, dan mampu memproduksi konten pemasaran. Beberapa UMKM bahkan berhasil menjangkau pasar baru di luar daerah melalui platform e-commerce dan Google Maps.

Data lapangan menunjukkan bahwa Google Maps merupakan salah satu alat digital yang paling banyak dimanfaatkan oleh UMKM, terutama untuk usaha kuliner, jasa, serta toko fisik. Pemilik usaha menyatakan bahwa pencantuman lokasi usaha dan ulasan pelanggan di Google Maps dapat meningkatkan visibilitas usaha mereka, sehingga menarik lebih banyak pengunjung. Pemerintah daerah turut memberikan pendampingan dalam mengoptimalkan fitur Google Business Profile sebagai salah satu strategi pemasaran digital.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya beberapa hambatan yang menghambat efektivitas implementasi program UMKM Go-Digital. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah kesenjangan literasi digital antara pelaku UMKM muda dan pelaku UMKM lanjut usia. Pelaku UMKM dari kelompok usia lanjut cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami teknologi digital dan aplikasi pemasaran. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa kecamatan juga menghambat pelaksanaan pendampingan digital secara optimal.

Hambatan lain yang ditemukan adalah kurangnya tenaga pendamping yang memiliki kompetensi digital tingkat lanjut. Pada beberapa kegiatan pelatihan, peserta mengeluhkan bahwa pendamping tidak mampu menjelaskan secara teknis fitur-fitur lanjutan dari platform digital sehingga pelatihan tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pendamping merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas program.

Meskipun berbagai hambatan tersebut masih ditemui, mayoritas pelaku UMKM menyatakan bahwa program UMKM Go-Digital memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mereka. Dampak tersebut meliputi peningkatan jangkauan pasar, efisiensi operasional melalui penggunaan aplikasi keuangan digital, peningkatan volume penjualan, serta terbukanya peluang bisnis baru. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan

bahwa program UMKM Go-Digital memiliki potensi besar sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat struktur ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui program UMKM Go-Digital telah berada pada jalur yang tepat, namun masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pandangan (Ndraha et al., 2024) yang menegaskan bahwa ekonomi digital berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, terutama melalui perluasan akses pasar dan efisiensi operasional. Dalam konteks ini, program pelatihan literasi digital, workshop e-commerce, serta integrasi media sosial yang dilakukan pemerintah daerah terbukti menjadi faktor kunci yang membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan model bisnis di era Industri 4.0.

Hasil lapangan yang memperlihatkan adanya peningkatan pemanfaatan platform digital oleh pelaku UMKM juga selaras dengan temuan (Morisson & Fikri, 2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi merupakan strategi utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di tengah intensitas persaingan global. Penggunaan media sosial, marketplace, dan Google Maps oleh pelaku UMKM di daerah penelitian mengonfirmasi bahwa transformasi digital telah membawa perubahan nyata pada pola pemasaran, interaksi pelanggan, dan distribusi produk. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dapat dinilai efektif dalam meningkatkan kapabilitas teknis dan pemasaran pelaku usaha.

Namun, sejumlah hambatan implementasi masih muncul dan perlu mendapat perhatian. Kesulitan seperti keterbatasan jaringan internet, minimnya kompetensi pendamping digital, dan kesenjangan literasi digital antar pelaku UMKM sejalan dengan temuan (Hapiz et al., 2025), yang mengidentifikasi tiga isu besar dalam kebijakan pengembangan UMKM digital: ketimpangan akses teknologi, kualitas pendampingan yang belum merata, dan kebutuhan penyelarasan regulasi lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan digitalisasi telah berjalan, infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung program masih belum optimal.

Di sisi lain, keberadaan kebijakan kolaboratif antara pemerintah daerah dengan marketplace, lembaga perbankan, dan penyedia teknologi merupakan langkah strategis yang sesuai dengan rekomendasi (Nurhayati & Ridwan, 2025), yang menekankan bahwa pengembangan UMKM digital memerlukan dukungan politik ekonomi yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai enabler

yang memastikan terciptanya ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas lembaga memberi dampak signifikan terhadap akses pembiayaan, pembinaan usaha, dan kesiapan UMKM menghadapi pasar digital.

Transformasi digital UMKM juga dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat yang bersifat internal maupun eksternal sebagaimana dijelaskan (Maimuna et al., 2024). Dari sisi pendorong, pelaku UMKM merasa termotivasi untuk meningkatkan keterampilan digital demi memperluas pasar dan memperbaiki manajemen usaha. Dari sisi penghambat, faktor usia pelaku UMKM, keterbatasan perangkat digital, dan rendahnya adaptasi teknologi menjadi kendala yang masih sulit diatasi. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut, karena pelaku UMKM yang berusia lebih lanjut cenderung mengalami kesulitan dalam mempelajari aplikasi digital pemasaran dan pencatatan keuangan.

Temuan ini mendukung pandangan (Handini et al., 2025) bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inovatif. Pemerintah daerah yang mampu membaca kebutuhan masyarakat dan menyediakan pelatihan digital yang relevan akan mampu memperkuat struktur ekonomi lokal di era digital. Hal ini juga berkaitan erat dengan konsep ekonomi inklusif sebagaimana dijelaskan oleh (Olii et al., 2025) di mana kebijakan harus tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang digital.

Program UMKM Go-Digital juga dapat dipahami sebagai upaya mitigasi tantangan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan (Malihah et al., 2022) yang menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi memerlukan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. Dalam konteks ini, digitalisasi UMKM merupakan strategi adaptasi yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah perubahan pola konsumsi, mobilitas, dan perilaku pasar.

Beberapa studi seperti (Suhardi & Panjaitan, 2025; Zulaika et al., 2024) menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kemitraan bisnis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian terhadap teori tersebut, karena pemerintah daerah secara aktif menjalin kemitraan dengan platform digital dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem digital UMKM. Kemitraan ini mempermudah pelaku UMKM untuk masuk ke rantai pasokan digital dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar digital nasional maupun regional.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai studi implementatif terkait program UMKM Go-Digital (Justitia et al., 2024; Muzdalifah et al., 2020; Sucipto et al., 2025). Studi-

studi tersebut menunjukkan bahwa pelatihan pemasaran digital, desain website, dan integrasi katalog online berpengaruh nyata terhadap peningkatan penjualan dan jangkauan pasar. Temuan bahwa UMKM dapat memanfaatkan Google Maps dan media sosial untuk menarik pelanggan mendukung hasil Sucipto et al. (2025), yang menyatakan bahwa literasi digital yang baik akan meningkatkan visibilitas usaha dan memperkuat hubungan dengan konsumen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan program UMKM Go-Digital telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi digital, daya saing usaha, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi pendamping, serta keberlanjutan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor teknologi. Dengan memperhatikan rekomendasi penelitian terdahulu, pemerintah daerah perlu memperluas cakupan pelatihan, memfasilitasi jaringan internet yang merata, serta meningkatkan kualitas pendampingan digital agar digitalisasi UMKM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program UMKM Go-Digital telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas digital, jangkauan pemasaran, dan perkembangan usaha para pelaku UMKM. Pemerintah daerah berhasil menyediakan fasilitas pelatihan, pendampingan, dan kemitraan strategis yang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital secara lebih optimal. Meskipun demikian, keberhasilan program masih terhambat oleh kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta belum meratanya kualitas pendampingan di lapangan. Dengan demikian, tujuan penelitian telah tercapai, yaitu memahami implementasi kebijakan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap penguatan digitalisasi UMKM secara komprehensif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperluas cakupan pelatihan literasi digital melalui model pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan pemerataan infrastruktur jaringan internet terutama di wilayah pinggiran, serta memperkuat kapasitas pendamping UMKM melalui sertifikasi kompetensi di bidang digitalisasi. Pemerintah juga perlu memperdalam kemitraan dengan sektor swasta, marketplace, dan lembaga keuangan agar akses pemasaran dan pembiayaan UMKM semakin inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan jumlah informan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak daerah, melakukan komparasi antarwilayah, atau mengkaji efektivitas digitalisasi UMKM dengan pendekatan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam dan terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta para pelaku UMKM yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang memberikan dukungan akademik maupun fasilitas dalam penyusunan penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian akademik yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan digitalisasi UMKM di daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95–112. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.335>
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986.
- Hapiz, M., Septia, L. P., Aprilianti, D., Aprilianto, D., & Maulida, I. (2025). Analisis Kebijakan Pengembangan UMKM Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 36–44.
- Justitia, A., Werdiningsih, I., Effendy, F., & Taufik, T. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing bagi UMKM Jasa Laundry menuju UMKM Go Digital. *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 60–72.
- Lyman, A. P., & Subroto, B. (2017). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Harga Saham (Studi pada perusahaan property dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2017). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejurnal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Ma'aruf, A. R. S., & Putra, D. K. S. (2019). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Personal Branding Joko Widodo Pada Pemilih Pemula Pemilu 2019. *Journal Acta Diurna*, 15(2), 1. <https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2019.15.2.2129>
- Made Saraa, I., Adi Kurniawan Saputra, K., & Wayan Kartika Jaya Utama, I. (2020). Financial Statements of Micro, Small and Medium Enterprises Based on the Concept of an Economic Entity. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*, 47(12), 125–132.
- Maimuna, F. F., Alda, N., Roroa, F., & Agit, A. (2024). Transformasi Digital dalam Kewirausahaan: Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset*

Ilmu Sosial, x.

- Malihah, L., Global, P., & Berkelanjutan, E. (2022). TANTANGAN DALAM UPAYA MENGATASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN: SEBUAH TINJAUAN CHALLENGES IN OVERCOMING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE AND SUPPORTING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT: A REVIEW. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219–232. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>
- Marlinah, L. (2019). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Penguatan Sektor Ekonomi Digitalpreneur dan Creativepreneur. *Ikraith-Ekonomika*, 2(1), 32–38.
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *E-BISNIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 289–299.
- Muzdalifah, L., Novie, M., & Zaqiyah, S. (2020). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju UMKM Go-Digital di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Sidoarjo. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 20, 2200–2208.
- Ndraha, A. B., Zebua, D., Zega, A., & Sebua, M. . (2024). DAMPAK EKONOMI DIGITAL TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0. *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 01(01), 27–32.
- Nurhayati, D. A., & Ridwan, R. M. (2025). ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Olii, R. A., Ibrahim, R., Hasan, A. S., Ichsan, U., & Utara, G. (2025). PENGUATAN EKONOMI LOKAL : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDUKUNG EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(4), 1649–1661.
- Sucipto, K. R. R., Aras, R. A., Salam, M. F., Rahmawati, A., Afrizal, Y. H., & Rijal, S. (2025). UMKM Go Digital : Peningkatan Literasi Digital UMKM Kota Makassar Pemanfaatan Google Maps dan Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(3), 3731–3737.
- Suhardi, & Panjaitan, P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, Dan Ekonomi*, 3(1), 42–55.
- Swann, C., Jackman, P. C., Lawrence, A., Hawkins, R. M., Goddard, S. G., Williamson, O., Schweickle, M. J., Vella, S. A., Rosenbaum, S., & Ekkekakis, P. (2023). The (over)use of SMART goals for physical activity promotion: A narrative review and critique. *Health Psychology Review*, 17(2), 211–226. <https://doi.org/10.1080/17437199.2021.2023608>
- Zulaika, S., Harsono, I., Mahmudin, T., Yahya, A. S., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kemitraan Bisnis dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(01), 41–55.